

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, terdapat tuntutan sektor publik khususnya pemerintah yaitu terlaksananya akuntabilitas pengelolaan keuangan sebagai bentuk terwujudnya praktik *good governance*, akibat kinerja pemerintahan di Indonesia mengalami keterpurukan karena buruknya pengelolaan keuangan (Ariyantini dkk,2014).

Dalam beberapa tahun terakhir, permasalahan hukum terutama berkaitan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan segala praktiknya seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi telah menjadi perhatian masyarakat dan dianggap sebagai suatu hal yang lazim terjadi di negara ini (Najib, 2013).

Tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menghendaki adanya pelaksanaan fungsi pengawasan dan sistem pengendalian intern yang baik atas pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara (Najib, 2013).

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, pemerintah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang

bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dimana kegiatan ini dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Selain itu, menurut Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Pasal 2, BPKP sebagai auditor internal yang bertanggung jawab kepada Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dimana salah satu fungsi BPKP adalah pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan dan pengeluaran negara/daerah.

Untuk memperkuat tugas dan fungsi BPKP, maka terbitlah Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 dimana BPKP ditugaskan untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/daerah, melalui audit dan evaluasi terhadap berbagai aspek pemerintahan.

Menurut Arens, *et.al.* (2008) audit harus dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi dan independen sebab kompetensi orang-orang yang melaksanakan audit tidak akan ada nilainya jika mereka tidak independen dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti. Hal ini dikarenakan kualitas hasil audit

yang dihasilkan auditor menjadi suatu hal yang penting karena akan memengaruhi keputusan tindak lanjut dari pengguna laporan hasil audit tersebut (Khairunissa, 2015).

Untuk dapat memiliki kompetensi yang mumpuni, seorang auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup. Pencapaian dimulai dengan pendidikan formal, yang selanjutnya diperluas melalui pengalaman dan praktek audit (Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP), 2011). Hal ini serupa dengan pendapat Arens, *et.al.* (2008) bahwa pelatihan dan kecakapan teknis yang memadai yang diinterpretasikan sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal di bidang auditing dan akuntansi, pengalaman kerja dan praktek yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan profesional yang berkelanjutan.

Selain hal tersebut, di dalam SPAP (2011) tentang Standar Umum Kedua PSA No. 4 SA Seksi 220 dimana dalam standar tersebut menjelaskan bahwa dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Standar ini mengharuskan bahwa auditor harus bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal auditor berpraktik sebagai auditor intern). Dengan demikian, auditor tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun, sebab bagaimana pun sempurnanya keahlian teknis yang dimiliki auditor, auditor akan kehilangan sikap tidak memihak, yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya.

Kompetensi dan independensi merupakan standar yang harus dipenuhi oleh seorang auditor untuk dapat melakukan audit dengan baik. Namun, ada hal lain yang menurut Carolita (2012) yaitu pengalaman kerja dimana pengalaman adalah keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh seseorang setelah mengerjakan sesuatu hal. Pengalaman seorang auditor akan terus meningkat seiring dengan semakin banyaknya waktu untuk melakukan audit serta semakin kompleksnya transaksi keuangan yang diaudit dapat memperluas pengetahuan dibidangnya.

Kualitas audit menurut *Financial Reporting Council* (2006) dalam Badjuri (2011) diukur dengan pendapat profesional auditor yang tepat dan didukung oleh bukti dan penilaian objektif. Seorang auditor memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pemegang saham jika mereka memberikan laporan audit yang independen, dapat diandalkan dan didukung dengan bukti audit yang memadai.

Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai kualitas audit ini. Gustiawan (2015) menemukan bahwa secara simultan atau bersama-sama kompetensi, independensi, pengalaman dan etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Namun secara parsial atau sendiri-sendiri kompetensi, independensi, pengalaman dan etika auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Carolita dan Rahardjo (2012) menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan pengalaman audit berpengaruh terhadap kualitas audit. Berbeda dengan Mulyadi (2012) yang menemukan bahwa kompetensi, independensi, dan pengalaman audit berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dengan adanya berbagai macam perbedaan temuan yang dilakukan peneliti sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kualitas audit. Sehingga peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat).”**

1.2. Rumusan Masalah

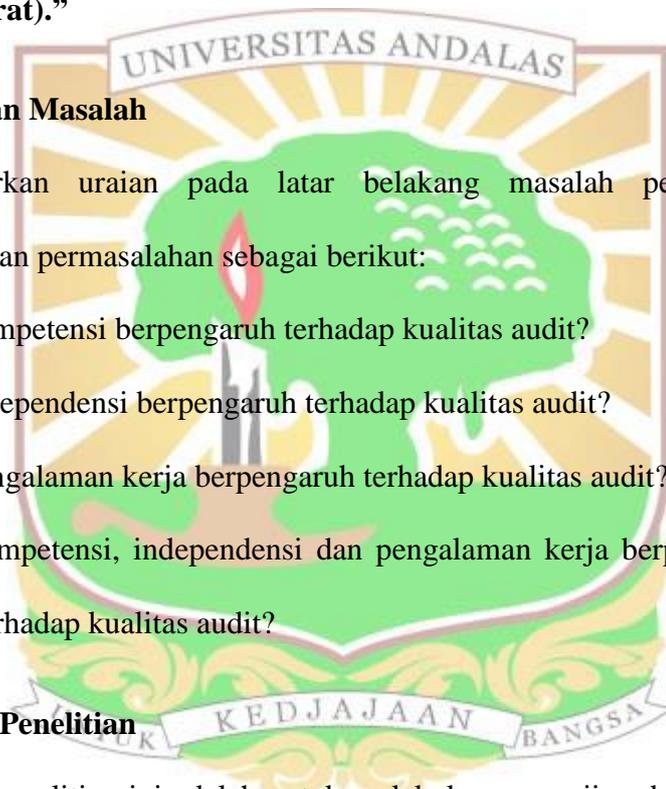
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah penelitian, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
- b. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
- c. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit?
- d. Apakah kompetensi, independensi dan pengalaman kerja berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan pengujian dan membuktikan secara empiris mengenai:

- a. Pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit.
- b. Pengaruh independensi terhadap kualitas audit
- c. Pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas audit.
- d. Pengaruh kompetensi, independensi dan pengalaman kerja secara simultan terhadap kualitas audit.



1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa :

a. Bagi penulis

Memberikan wawasan dan pengetahuan sekaligus dapat membuktikan secara empiris mengenai pengaruh kompetensi, independensi dan pengalaman kerja terhadap kualitas audit.

b. Bagi pembaca

Menambah wawasan dan pengetahuan pembaca dalam bidang audit internal, sehingga penelitian ini dapat dijadikan bahan penelitian selanjutnya.

c. Bagi BPKP

Memberikan kontribusi bagi BPKP sehingga auditor dalam melakukan audit menggunakan pertimbangan profesionalnya lebih baik lagi agar dapat meningkatkan kualitas auditnya sehingga membawa organisasi BPKP ini menuju arah yang lebih baik.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab satu adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah yang berisikan tentang permasalahan penelitian dan mengapa masalah itu penting sehingga perlu diteliti. Kemudian menjelaskan rumusan masalah yaitu menjelaskan rumusan secara kongkrit terkait dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya tujuan penelitian di mana dalam bagian ini mengungkapkan hasil yang ingin dicapai melalui proses penelitian. Setelah itu adalah manfaat penelitian di mana pada bagian ini mengungkapkan pihak atau orang yang akan memperoleh

manfaat dan bentuk manfaat dari hasil penelitian. Terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab dua merupakan tinjauan pustaka, yang membahas tentang tinjauan teoritis yang memuat uraian sistematis dan rasional tentang teori dasar yang relevan juga fakta-fakta dari hasil penelitian sebelumnya. Kemudian, menguraikan tentang revidi penelitian terdahulu yang dilanjutkan dengan kerangka pemikiran teoritis di mana kerangka pemikiran teoritis ini dieksplorasi dari berbagai teori atau pemikiran ilmiah, yang mencerminkan paradigma untuk memecahkan masalah penelitian. Selanjutnya, menjelaskan hipotesis penelitian yang merupakan proposisi keilmuan yang dilandasi oleh kerangka pemikiran teoritis.

Bab tiga menguraikan tentang metode penelitian. Menjelaskan tentang desain penelitian yang menjabarkan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data di dalam membantu penelitiannya. Kemudian, variabel penelitian dan definisi variabel penelitian yang berisikan identifikasi variabel yang diteliti, kemudian memuat batasan dan cara pengukuran masing-masing variabel. Dilanjutkan dengan populasi, sampel dan sampling penelitian yang berisikan penjelasan populasi subyek penelitian, sampel penelitian, dan sampling yang digunakan di dalam penelitian. Selanjutnya menjelaskan tentang data dan metode pengumpulan data yang digunakan didalam penelitian. Terakhir, metode analisis data yang menjabarkan metode yang digunakan peneliti terkait dengan cara menganalisis data dan pengujian lainnya yang berkaitan dengan proses pengolahan dan analisis data yang diperoleh selama penelitian.

Bab empat ini berisikan mengenai data penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan. Kemudian bab lima yang berisi mengenai kesimpulan, implikasi, keterbatasan, dan saran.

